

**TATA KELOLA KETAHANAN FISKAL ADAPTIF DI ERA KRISIS
GLOBAL: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS DAN KERANGKA
INTEGRATIF**

Nekky Rahmiyati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
nekky@untag-sby.ac.id

Endang Indartuti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Meningkatnya frekuensi dan keterkaitan antara krisis keuangan, kesehatan, geopolitik, energi, dan iklim telah memperbesar tekanan fiskal serta memperlihatkan keterbatasan pendekatan konvensional terhadap keberlanjutan fiskal. penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan literatur sistematis mengenai tata kelola ketahanan fiskal adaptif dalam menghadapi krisis global. Penelitian ini meninjau secara sistematis literatur mengenai tata kelola ketahanan fiskal adaptif dan mengembangkan kerangka integratif yang menjelaskan kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi, menyerap, merespons, dan beradaptasi terhadap guncangan fiskal. Review mencakup artikel jurnal berbahasa Inggris yang diterbitkan pada periode 2014–Agustus 2026 dan diidentifikasi melalui Scopus sebagai basis data utama, sedangkan Google Scholar dan laman penerbit digunakan untuk pemeriksaan silang sitasi dan akses teks lengkap. Pencarian awal menghasilkan 36 artikel. Setelah penghapusan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, penilaian kelayakan teks lengkap, serta penilaian kualitas studi berdasarkan protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), sebanyak 27 artikel dipertahankan untuk sintesis akhir. Data dianalisis menggunakan klasifikasi deskriptif, pengodean tematik, perbandingan antarstudi, dan sintesis integratif. Hasil penelitian mengidentifikasi empat dimensi ketahanan fiskal adaptif yang saling berhubungan, yaitu risiko geopolitik dan paparan terhadap krisis global, pengelolaan utang publik dan ruang fiskal, kapasitas negara dan kelembagaan, serta federalisme fiskal dan koordinasi antarpemerintah. Guncangan geopolitik memengaruhi ketahanan fiskal melalui penurunan penerimaan, peningkatan pengeluaran, kenaikan biaya pembiayaan, dan kerentanan utang. Namun, besarnya pengaruh tersebut bergantung pada kapasitas kelembagaan, fleksibilitas pembiayaan, dan kemampuan pemerintah mengoordinasikan respons fiskal pada berbagai tingkat pemerintahan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian rumpun literatur yang sebelumnya terfragmentasi ke dalam kerangka multidimensional yang menempatkan ketahanan fiskal sebagai kemampuan tata kelola dinamis, bukan sekadar kepatuhan terhadap rasio fiskal. Kerangka ini dapat digunakan untuk memperkuat penyangga fiskal, tata kelola utang, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarpemerintah guna menjaga pelayanan dan nilai publik selama krisis global.

Kata Kunci: *Ketahanan Fiskal Adaptif; Tata Kelola Fiskal; Krisis Global; Risiko Geopolitik; Utang Publik; Kapasitas Negara; Federalisme Fiskal; Tinjauan Literatur Sistematis*

ABSTRACT

The growing frequency and interconnectedness of financial, health, geopolitical, energy, and climate-related crises have intensified fiscal pressures and exposed the limitations of conventional fiscal sustainability approaches. This study systematically reviews the literature on adaptive fiscal resilience governance and develops an integrative framework explaining how governments anticipate, absorb, respond to, and adapt to fiscal shocks. The review covers English-language journal articles published between 2014 and August 2026 and identified through Scopus as the primary database, while Google Scholar and publisher websites were used for citation cross-checking and full-text retrieval. The initial search identified 36 articles. Following duplicate removal, title and abstract screening, full-text eligibility assessment, and study quality assessment based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) protocol, 27 articles were retained for final synthesis. Data were analyzed using descriptive classification, thematic coding, cross-study comparison, and integrative synthesis. The findings identify four interdependent dimensions of adaptive fiscal resilience: geopolitical risk and global crisis exposure, public debt and fiscal-space management, state and institutional capacity, and fiscal federalism and intergovernmental coordination. Geopolitical shocks affect fiscal resilience through revenue contraction, expenditure escalation, financing costs, and debt vulnerability. However, their effects depend on governments' institutional capacity, financing flexibility, and ability to coordinate fiscal responses across levels of government. The novelty of this study lies in integrating these previously fragmented research streams into a multidimensional framework that positions fiscal resilience as a dynamic governance capability rather than merely compliance with fiscal ratios. The framework provides policymakers with a basis for strengthening fiscal buffers, improving debt governance, building institutional capacity, and enhancing intergovernmental coordination to sustain public services and public value during global crises.

Keywords: *Adaptive Fiscal Resilience; Fiscal Governance; Global Crises; Geopolitical Risk; Public Debt; State Capacity; Fiscal Federalism; Systematic Literature Review*

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya frekuensi, intensitas, dan keterkaitan berbagai krisis global telah mengubah lingkungan pengelolaan keuangan publik secara fundamental. Krisis keuangan global, pandemi COVID-19, konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan, volatilitas harga energi dan pangan, bencana terkait perubahan iklim, serta kenaikan suku bunga global secara bersamaan memengaruhi penerimaan pemerintah, pengeluaran publik, defisit anggaran, dan biaya pembiayaan utang. Berbagai guncangan tersebut juga menuntut pemerintah untuk memperluas

perlindungan sosial, mempertahankan pelayanan publik, mendukung pemulihan ekonomi, dan menjaga stabilitas makroekonomi dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas.

Perkembangan tersebut memperlihatkan keterbatasan pendekatan konvensional terhadap keberlanjutan fiskal. Penilaian tradisional pada umumnya menekankan indikator berupa rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto, defisit anggaran, keseimbangan primer, dan kemampuan membayar kewajiban utang. Meskipun indikator tersebut tetap penting, indikator fiskal tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa pemerintah dengan kondisi fiskal yang relatif sama dapat memiliki kemampuan berbeda dalam menghadapi dan memulihkan diri dari guncangan yang serupa. Hasil fiskal juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, kapasitas administratif, fleksibilitas pembiayaan, koordinasi kebijakan, serta distribusi kewenangan fiskal antartingkat pemerintahan.

Oleh karena itu, pendekatan keberlanjutan fiskal perlu dilengkapi dengan konsep **tata kelola ketahanan fiskal adaptif** (*adaptive fiscal resilience governance*). Konsep ini merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman fiskal, menyerap dampak awal krisis, mengatur kembali sumber daya fiskal, mengoordinasikan respons kebijakan, dan menyesuaikan institusi fiskal tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang, pelayanan publik, dan penciptaan nilai publik. Ketahanan fiskal adaptif tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mengembalikan kondisi fiskal seperti sebelum krisis, tetapi juga mencakup kemampuan belajar, menyesuaikan kebijakan, mendiversifikasi penerimaan, memprioritaskan kembali pengeluaran, memperbaiki tata kelola utang, dan menata hubungan fiskal antartingkat pemerintahan.

Dengan demikian, ketahanan fiskal merupakan kemampuan tata kelola yang bersifat dinamis dan bukan sekadar kepatuhan terhadap batas atau rasio fiskal tertentu. Pemerintah yang tangguh secara fiskal tidak hanya memiliki tingkat utang dan defisit yang terkendali, tetapi juga mempunyai kemampuan institusional untuk mengidentifikasi risiko, merespons perubahan, mengalokasikan sumber daya secara cepat, dan mempertahankan pelayanan publik selama krisis. Meskipun konsep tersebut semakin relevan, pengetahuan yang tersedia masih tersebar dalam beberapa rumpun penelitian yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Review Terdahulu dan Fokus Masing-Masing

Rumpun penelitian pertama membahas ketahanan keuangan. Tahir et al. (2025) melakukan *systematic literature review* terhadap 155 artikel yang terindeks Scopus dan diterbitkan sampai Desember 2023. Review tersebut menganalisis perkembangan publikasi, pendekatan metodologis, anteseden, konsekuensi, serta agenda penelitian mengenai ketahanan keuangan. Unit analisisnya mencakup ketahanan keuangan pada tingkat individu, organisasi, dan pemerintahan. Hasil review mengidentifikasi ketahanan keuangan pemerintah sebagai salah satu domain penting serta menekankan kemampuan untuk menyerap gangguan dan berkembang setelah terjadinya guncangan keuangan.

Namun, karena review tersebut mencakup beberapa tingkat analisis sekaligus, ketahanan fiskal pemerintah belum dibahas secara spesifik dari perspektif tata kelola keuangan publik. Perbedaan karakteristik antara individu, perusahaan, dan pemerintah juga belum sepenuhnya dielaborasi. Review tersebut belum

mengintegrasikan paparan risiko geopolitik, struktur utang pemerintah, kapasitas negara, dan hubungan fiskal antartingkat pemerintahan ke dalam suatu kerangka ketahanan fiskal yang terpadu ([Tahir et al., 2025](#)).

Rumpun kedua berfokus pada keberlanjutan utang publik. Kaur et al. (2022) mengkaji 535 publikasi terindeks Scopus periode 1991–2021 menggunakan analisis kinerja bibliometrik dan pemetaan ilmu pengetahuan. Unit analisisnya adalah publikasi global tentang keberlanjutan utang publik, termasuk dokumen, penulis, institusi, negara, sitasi, dan kata kunci. Review tersebut mengidentifikasi tiga kelompok utama penelitian, yaitu keberlanjutan fiskal dan aturan fiskal, pengujian empiris keberlanjutan utang, serta hubungan antara utang publik dan pertumbuhan ekonomi.

Review tersebut memberikan gambaran penting mengenai struktur intelektual penelitian utang publik. Namun, utang lebih banyak diperlakukan sebagai variabel makroekonomi dan keuangan. Pembahasan mengenai kemampuan institusional pemerintah dalam mengelola utang pada masa krisis masih terbatas. Review tersebut juga belum menjelaskan bagaimana risiko geopolitik, kapasitas negara, dan hubungan fiskal antarpemerintah memengaruhi kemampuan pemerintah mempertahankan keberlanjutan utangnya ([Kaur et al., 2022](#)).

Kajian lain memetakan perkembangan literatur keberlanjutan fiskal secara lebih luas. Varghese (2025) menganalisis 1.231 publikasi terindeks Scopus periode 1976–2023. Penelitian tersebut mengidentifikasi pertumbuhan publikasi, penulis berpengaruh, kontribusi institusi dan negara, pola kolaborasi, serta perkembangan tema penelitian. Unit analisisnya mencakup dokumen, penulis, institusi, negara, sitasi, dan kata kunci.

Meskipun memberikan gambaran luas mengenai perkembangan penelitian keberlanjutan fiskal, kajian tersebut lebih berorientasi pada pemetaan struktur bidang ilmu. Kajian tersebut belum membangun penjelasan mengenai mekanisme yang menghubungkan krisis global dengan tekanan fiskal, kerentanan utang, kemampuan institusional, dan hubungan antartingkat pemerintahan. Dengan demikian, keberlanjutan fiskal masih lebih banyak ditempatkan sebagai hasil makroekonomi daripada sebagai kemampuan tata kelola adaptif ([Varghese, 2025](#)).

Rumpun ketiga membahas federalisme fiskal dan hubungan keuangan antarpemerintah. Lago, Lago-Peñas, dan Martinez-Vazquez (2024) melakukan survei komprehensif terhadap literatur mengenai transfer antarpemerintah yang berkembang selama beberapa dekade hingga 2023. Review tersebut berfokus pada pengaruh transfer fiskal terhadap kebijakan perpajakan, pengeluaran pemerintah, stabilitas fiskal, perilaku pemerintah daerah, dan insentif politik. Unit analisis utamanya adalah pemerintah daerah, pemerintah tingkat menengah, dan sistem hubungan fiskal antarpemerintah.

Hasil review menunjukkan bahwa dampak transfer fiskal sangat bergantung pada desain transfer, insentif politik, dan konteks kelembagaan. Namun, kajian tersebut belum menempatkan hubungan fiskal antarpemerintah dalam kerangka ketahanan fiskal yang lebih luas. Risiko geopolitik, kerentanan utang pemerintah, kapasitas institusional, dan kemampuan adaptasi selama krisis belum diintegrasikan ke dalam analisis federalisme fiskal ([Lago et al., 2024](#)).

Rumpun keempat mengkaji risiko geopolitik dan konsekuensi ekonomi serta keuangannya. Aiswarya dan Muthumeenakshi (2024) menelaah perkembangan literatur risiko geopolitik yang tersedia hingga 2024 menggunakan prosedur bibliometrik dan sistematis. Analisisnya mencakup perkembangan publikasi, penulis dan negara berpengaruh, jaringan kolaborasi, struktur kata kunci, metode penelitian, serta pengaruh risiko geopolitik terhadap variabel keuangan dan makroekonomi. Unit analisisnya terdiri atas dokumen ilmiah, penulis, negara, kata kunci, dan metode penelitian.

Namun, sebagian besar literatur tersebut berfokus pada pasar keuangan, harga aset, investasi, ketidakpastian ekonomi, dan volatilitas pasar. Pemerintah umumnya diperlakukan sebagai bagian dari lingkungan makroekonomi, bukan sebagai organisasi fiskal yang memiliki struktur utang, kapasitas kelembagaan, ruang fiskal, dan sistem koordinasi antarpemerintah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hubungan antara risiko geopolitik dan tata kelola ketahanan fiskal belum memperoleh penjelasan yang memadai (Aiswarya & Muthumeenakshi, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Review Terdahulu dan Posisi Penelitian

Review	Fokus utama	Periode dan unit analisis	Aspek yang belum diintegrasikan
Tahir et al. (2025)	Anteseden, konsekuensi, metode, dan domain ketahanan keuangan	155 artikel Scopus sampai Desember 2023; individu, organisasi, dan pemerintahan	Belum menghubungkan ketahanan fiskal pemerintah dengan geopolitik, utang publik, kapasitas negara, dan federalisme fiskal
Kaur et al. (2022)	Struktur intelektual penelitian keberlanjutan utang publik	535 publikasi Scopus periode 1991–2021; dokumen, penulis, institusi, negara, sitasi, dan kata kunci	Belum menghubungkan utang dengan tata kelola adaptif, kapasitas kelembagaan, risiko geopolitik, dan hubungan antarpemerintah
Varghese (2025)	Perkembangan dan struktur tematik penelitian keberlanjutan fiskal	1.231 publikasi Scopus periode 1976–2023; dokumen, penulis, institusi, negara, sitasi, dan kata kunci	Berfokus pada pemetaan penelitian dan belum menjelaskan mekanisme respons pemerintah terhadap krisis global
Lago et al. (2024)	Dampak transfer fiskal dan	Literatur beberapa dekade sampai	Belum mengintegrasikan

	hubungan keuangan antarpemerintah	2023; pemerintah daerah dan sistem fiskal antarpemerintah	tekanan geopolitik, kerentanan utang, kapasitas negara, dan ketahanan fiskal adaptif
Aiswarya dan Muthumeenakshi (2024)	Perkembangan dan konsekuensi ekonomi risiko geopolitik	Publikasi yang tersedia sampai 2024; dokumen, penulis, negara, kata kunci, dan metode	Lebih menekankan pasar keuangan dan variabel makroekonomi daripada kapasitas fiskal dan tata kelola multilevel
Penelitian ini	Tata kelola ketahanan fiskal adaptif pada era krisis global	Artikel jurnal berbahasa Inggris periode 2014–Agustus 2026; studi empiris dan konseptual mengenai ketahanan fiskal pemerintah	Mengintegrasikan geopolitik, utang publik, kapasitas negara, dan federalisme fiskal melalui SLR dan sintesis integratif

Kesenjangan Penelitian

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa review terdahulu telah menghasilkan pengetahuan yang penting, tetapi masih terfragmentasi. Literatur ketahanan keuangan menjelaskan kemampuan aktor dalam menyerap dan beradaptasi terhadap gangguan keuangan, tetapi sering kali menggabungkan individu, organisasi, dan pemerintah meskipun ketiganya memiliki karakteristik berbeda. Literatur utang publik menjelaskan faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan utang, tetapi belum memberikan perhatian yang memadai terhadap kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan.

Literatur keberlanjutan fiskal telah memetakan perkembangan penelitian dan indikator-indikator fiskal, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme adaptasi pemerintah. Literatur federalisme fiskal menjelaskan distribusi kewenangan dan sumber daya antarpemerintah, tetapi jarang menghubungkannya dengan tekanan geopolitik global. Sementara itu, literatur risiko geopolitik lebih banyak membahas pasar keuangan dan konsekuensi makroekonomi daripada proses institusional yang mendasari respons fiskal pemerintah.

Akibatnya, literatur yang ada belum memberikan penjelasan terpadu mengenai keseluruhan proses pembentukan ketahanan fiskal. Belum dijelaskan secara komprehensif bagaimana krisis geopolitik menciptakan tekanan fiskal, bagaimana utang dan ruang fiskal menentukan kemampuan pemerintah menyerap tekanan tersebut, bagaimana kapasitas negara memengaruhi efektivitas respons, serta bagaimana federalisme fiskal mendistribusikan risiko, sumber daya, dan kemampuan respons di antara berbagai tingkat pemerintahan.

Kesenjangan penelitian ini bukan hanya disebabkan oleh terbatasnya penelitian yang secara eksplisit menggunakan istilah *fiscal resilience*. Kesenjangan yang lebih substantif adalah belum tersedianya kerangka tata kelola integratif yang menghubungkan sumber guncangan fiskal, saluran keuangan yang meneruskan guncangan, kapasitas institusional yang diperlukan untuk merespons, dan arsitektur pemerintahan multilevel yang mendistribusikan sumber daya serta tanggung jawab fiskal.

Urgensi Integrasi Empat Dimensi

Pertama, **risiko geopolitik** merupakan sumber guncangan fiskal yang semakin penting. Perang, sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, ketegangan regional, dan ketidakpastian geopolitik memengaruhi perdagangan, investasi, nilai tukar, harga komoditas, inflasi, serta suku bunga. Kondisi tersebut dapat menurunkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kebutuhan pengeluaran untuk subsidi, perlindungan sosial, keamanan pangan dan energi, pertahanan, serta stabilisasi ekonomi.

Bukti empiris menunjukkan bahwa ketidakpastian geopolitik dapat meningkatkan risiko utang negara dan biaya pembiayaan pemerintah. Oleh karena itu, geopolitik perlu diperlakukan sebagai sumber langsung tekanan fiskal, bukan hanya sebagai kondisi eksternal dalam analisis makroekonomi ([Afonso, 2024](#); [Demiralay et al., 2024](#)).

Kedua, **utang publik dan ruang fiskal** berperan sebagai penyangga sekaligus sumber kerentanan. Pada masa krisis, pembiayaan utang memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan kontrasiklus, membantu rumah tangga dan dunia usaha, mempertahankan pelayanan publik, serta membiayai pemulihan ekonomi. Namun, tingkat utang yang tinggi, dominasi utang valuta asing, struktur jatuh tempo yang pendek, kenaikan biaya bunga, dan ketergantungan pada investor eksternal dapat memperbesar kerentanan fiskal.

Dengan demikian, ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang, tetapi juga oleh komposisi, biaya, jatuh tempo, kredibilitas pengelolaan, dan kemampuan pemerintah memperoleh pembiayaan pada saat terjadi ketidakpastian. Utang dapat memperkuat kemampuan absorpsi jangka pendek, tetapi pada saat yang sama dapat mengurangi kapasitas adaptasi jangka panjang apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Ketiga, **kapasitas negara** menentukan apakah sumber daya fiskal dapat diubah menjadi respons kebijakan yang efektif. Administrasi perpajakan, kredibilitas anggaran, kualitas birokrasi, sistem informasi digital, kemampuan regulasi, koordinasi kebijakan, dan kapasitas implementasi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan serta menyesuaikan pengeluaran.

Pemerintah dengan kapasitas negara yang kuat lebih mampu mendeteksi risiko lebih awal, melaksanakan intervensi secara tepat sasaran, mengendalikan kebocoran, dan menyesuaikan kebijakan ketika kondisi berubah. Sebaliknya, kapasitas yang lemah dapat menyebabkan keterlambatan respons, inefisiensi pengeluaran, rendahnya penerimaan, fragmentasi pelaksanaan kebijakan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Keempat, **federalisme fiskal** menentukan bagaimana kewenangan, sumber daya, dan risiko fiskal didistribusikan antartingkat pemerintahan. Krisis global sering menimbulkan dampak yang berbeda antarwilayah, sedangkan pemerintah daerah biasanya memiliki tanggung jawab langsung dalam pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan bencana. Namun, kewenangan penerimaan dan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah sering kali lebih terbatas dibandingkan pemerintah pusat.

Transfer antarpemerintah, pembagian penerimaan, aturan pinjaman daerah, pembagian urusan, dan koordinasi pusat-daerah menentukan kemampuan sistem pemerintahan untuk merespons krisis secara kolektif. Desentralisasi dapat memperkuat ketahanan melalui respons yang sesuai dengan kondisi lokal, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan fiskal, mandat tanpa pendanaan, fragmentasi kebijakan, dan kegagalan koordinasi apabila pembagian kewenangan serta pendanaannya tidak dirancang secara tepat.

Keempat dimensi tersebut saling berkaitan. Krisis geopolitik menciptakan guncangan fiskal; utang dan ruang fiskal menentukan kemampuan awal pemerintah menyerap guncangan; kapasitas negara menentukan kualitas, kecepatan, dan kemampuan adaptasi respons; sedangkan federalisme fiskal menentukan distribusi kewenangan, sumber daya, dan risiko antartingkat pemerintahan. Integrasi keempatnya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai ketahanan fiskal adaptif dibandingkan dengan analisis masing-masing dimensi secara terpisah.

Tujuan, Pertanyaan Penelitian, dan Kontribusi

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan literatur sistematis mengenai tata kelola ketahanan fiskal adaptif dalam menghadapi krisis global. Penelitian menyintesis artikel jurnal berbahasa Inggris yang diterbitkan pada periode 2014–Agustus 2026 dan membangun kerangka integratif yang menghubungkan risiko geopolitik, tata kelola utang publik, kapasitas negara, dan federalisme fiskal.

Penelitian ini menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tata kelola ketahanan fiskal adaptif dikonseptualisasikan dan dikaji dalam literatur mengenai krisis global?
2. Bagaimana risiko geopolitik, utang publik, kapasitas negara, dan federalisme fiskal memengaruhi ketahanan fiskal pemerintah?
3. Bagaimana keempat dimensi tersebut dapat diintegrasikan dalam suatu kerangka tata kelola ketahanan fiskal adaptif?
4. Kesenjangan teoretis, metodologis, dan kebijakan apa yang dapat menjadi agenda penelitian selanjutnya?

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi empat rumpun penelitian yang sebelumnya berkembang secara terpisah. Penelitian ini menempatkan risiko geopolitik sebagai sumber guncangan fiskal eksternal; utang publik dan ruang fiskal sebagai mekanisme absorpsi sekaligus sumber kerentanan; kapasitas negara sebagai mekanisme institusional untuk merespons, belajar, dan beradaptasi; serta federalisme fiskal sebagai arsitektur tata kelola yang mendistribusikan kewenangan, sumber daya, dan risiko fiskal. Ketahanan fiskal adaptif dengan demikian dipahami sebagai hasil interaksi antara paparan eksternal, kemampuan keuangan, kapasitas institusional, dan tata kelola multilevel.

Secara teoretis, penelitian ini menghubungkan literatur ketahanan, keuangan publik, kapasitas negara, risiko geopolitik, dan federalisme fiskal dalam satu perspektif tata kelola. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan *systematic literature review* dan sintesis tematik integratif untuk membandingkan konsep, konteks, metode, variabel, dan temuan dari artikel terpilih. Secara praktis, kerangka yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat penyangga fiskal, meningkatkan tata kelola utang publik, mengembangkan kapasitas kelembagaan, dan memperbaiki koordinasi antarpemerintah. Kemampuan tersebut diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal, pelayanan publik, dan penciptaan nilai publik dalam menghadapi krisis global yang semakin kompleks.

B. TINJAUAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN KERANGKA

Governmental Financial Resilience Theory

Governmental Financial Resilience Theory digunakan karena menjelaskan bagaimana pemerintah menghadapi tekanan fiskal melalui interaksi antara kerentanan dan kapasitas respons. Ketahanan keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan atau rendahnya utang, tetapi oleh kombinasi sumber kerentanan, kapasitas antisipatif, dan kapasitas penanggulangan. Kerentanan menunjukkan tingkat paparan pemerintah terhadap tekanan ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Kapasitas antisipatif mencakup kemampuan mendeteksi risiko, menyusun skenario, membangun penyangga fiskal, dan menyiapkan rencana kontinjensi. Kapasitas penanggulangan mencakup kemampuan menyerap tekanan, menyesuaikan kebijakan, serta mentransformasi institusi ketika pengaturan lama tidak lagi memadai (Steccolini et al., 2017; Barbera et al., 2017).

Perspektif tersebut membedakan empat kemampuan yang berurutan tetapi saling berkaitan. Kapasitas antisipatif bekerja sebelum krisis melalui identifikasi risiko dan kesiapan fiskal. Kapasitas absorptif mempertahankan fungsi inti ketika guncangan terjadi. Kapasitas adaptif memungkinkan pemerintah mengubah alokasi, instrumen, dan pola koordinasi sesuai perkembangan keadaan. Kapasitas transformatif menghasilkan perubahan struktural setelah krisis, misalnya reformasi administrasi pajak, perbaikan tata kelola utang, digitalisasi anggaran, dan penataan hubungan fiskal pusat-daerah. Oleh karena itu, resiliensi bukan sekadar kembali pada kondisi sebelum krisis, tetapi juga kemampuan belajar dan membangun kondisi fiskal yang lebih kuat setelah krisis (Boin & van Eeten, 2013; Duit, 2016).

Dalam artikel ini, ketahanan fiskal adaptif didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi, menyerap, merespons, menyesuaikan diri, dan melakukan transformasi terhadap guncangan fiskal sambil mempertahankan keberlanjutan pembiayaan, pelayanan publik esensial, keadilan distribusi, dan nilai publik. Definisi ini memperluas governmental financial resilience dengan memasukkan sumber guncangan global, struktur pembiayaan negara, kapasitas institusional, dan tata kelola multilevel.

State Capacity Theory sebagai mekanisme konversi sumber daya

State Capacity Theory menjelaskan mengapa sumber daya fiskal yang serupa dapat menghasilkan tingkat ketahanan yang berbeda. Kapasitas negara merupakan kemampuan institusi publik untuk merumuskan keputusan, menghimpun sumber

daya, mengoordinasikan aktor, dan melaksanakan kebijakan secara efektif serta legitimate. Dalam konteks fiskal, kapasitas tersebut terdiri atas kapasitas ekstraktif, administratif, koordinatif, adaptif, dan relasional. Kapasitas ekstraktif menentukan kemampuan memobilisasi pajak dan penerimaan lainnya. Kapasitas administratif menentukan kualitas perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian, dan evaluasi. Kapasitas koordinatif menghubungkan kementerian, otoritas moneter, pemerintah daerah, dan aktor nonpemerintah. Kapasitas adaptif mendukung pembelajaran serta perubahan kebijakan, sedangkan kapasitas relasional membangun kepatuhan, kepercayaan, dan legitimasi publik (Fukuyama, 2013; Pierre & Peters, 2021).

Kapasitas negara berfungsi sebagai variabel mekanisme antara ketersediaan sumber daya dan hasil resiliensi. Ruang fiskal, utang, atau dana kontinjensi tidak secara otomatis menghasilkan respons yang efektif apabila pemerintah tidak memiliki data yang andal, birokrasi yang kompeten, koordinasi yang kuat, dan kemampuan implementasi. Sebaliknya, kapasitas negara yang kuat memungkinkan pemerintah mengubah sumber daya yang terbatas menjadi intervensi yang cepat, terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengaruh guncangan geopolitik dan tekanan utang terhadap ketahanan fiskal bersifat kondisional pada kualitas kapasitas negara.

Keynesian Fiscal Policy, ruang fiskal, dan tata kelola utang

Keynesian Fiscal Policy menjelaskan fungsi stabilisasi pemerintah ketika guncangan menurunkan permintaan agregat, kesempatan kerja, dan penerimaan publik. Belanja pemerintah, transfer, defisit, dan pembiayaan utang dapat digunakan secara kontrasiklus untuk membatasi kontraksi dan mencegah hilangnya kapasitas produktif. Namun, pendekatan Keynesian tidak membenarkan ekspansi fiskal permanen. Efektivitas intervensi bergantung pada ketepatan waktu, ketepatan sasaran, komposisi belanja, besarnya pengganda fiskal, kondisi moneter, dan kemampuan implementasi. Ruang fiskal yang digunakan pada masa krisis perlu disertai strategi normalisasi ketika perekonomian pulih (Keynes, 1936; Blanchard & Leigh, 2013).

Perspektif tata kelola utang melengkapi teori tersebut dengan membedakan antara utang sebagai instrumen absorpsi dan utang sebagai sumber kerentanan. Utang memperkuat resiliensi apabila menyediakan likuiditas bagi stabilisasi, menjaga pelayanan dasar, dan membiayai aset produktif. Sebaliknya, utang melemahkan resiliensi apabila meningkatkan risiko pembiayaan kembali, eksposur valuta asing, beban bunga, kewajiban kontinjensi, atau rigiditas anggaran. Karena itu, keberlanjutan tidak cukup dinilai dari rasio utang, tetapi juga dari biaya, jatuh tempo, komposisi mata uang, basis investor, kedalaman pasar domestik, transparansi, dan produktivitas penggunaan pembiayaan (Blanchard, 2019).

Hubungan antara utang dan ketahanan fiskal dengan demikian bersifat nonlinier dan kontekstual. Pada tahap awal krisis, utang dapat memperbesar kapasitas absorptif. Dalam jangka menengah, kualitas penggunaan dan pengelolaan portofolionya menentukan apakah utang memperkuat kapasitas adaptif atau justru mempersempit ruang kebijakan. Kerangka artikel ini karena itu memindahkan perhatian dari debt control semata menuju debt governance yang menghubungkan pembiayaan, risiko, hasil program, dan nilai publik.

Fiscal Federalism Theory dan resiliensi multilevel

Fiscal Federalism Theory menjelaskan pembagian fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, serta penetapan kewenangan penerimaan, belanja, transfer, dan pinjaman pada berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi dapat meningkatkan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, perbedaan basis pajak, kebutuhan belanja, paparan risiko, dan kapasitas administrasi dapat menghasilkan ketimpangan kemampuan merespons krisis (Musgrave, 1959; Oates, 1972, 1999).

Dalam kerangka ketahanan fiskal, transfer ekualisasi, dana darurat, pembagian penerimaan, fleksibilitas anggaran, standar pelayanan minimum, dan aturan pinjaman daerah merupakan infrastruktur resiliensi multilevel. Resiliensi nasional tidak dapat dicapai apabila pemerintah pusat memiliki ruang fiskal, tetapi pemerintah daerah yang menyediakan layanan utama tidak memperoleh sumber daya dan fleksibilitas yang memadai. Sebaliknya, fleksibilitas tanpa akuntabilitas dapat memperbesar moral hazard dan risiko fiskal. Multilevel governance diperlukan untuk menggabungkan pembagian informasi, koordinasi vertikal dan horizontal, diferensiasi respons berdasarkan intensitas guncangan wilayah, serta pertanggungjawaban bersama (Hooghe & Marks, 2003).

Federalisme fiskal dalam penelitian ini berperan sebagai arsitektur distribusi kapasitas dan risiko. Desain hubungan pusat-daerah dapat memperkuat pengaruh kapasitas negara terhadap resiliensi melalui koordinasi dan transfer adaptif, tetapi juga dapat melemahkannya melalui fragmentasi, ketimpangan kapasitas, mandat tanpa pendanaan, dan ketidakjelasan tanggung jawab.

Geopolitical Risk Theory dan transmisi guncangan fiskal

Geopolitical Risk Theory menjelaskan ketidakpastian yang timbul dari ancaman, realisasi, atau eskalasi konflik, perang, terorisme, sanksi, dan ketegangan antarnegara. Risiko tersebut memengaruhi fiskal melalui sedikitnya enam saluran: perdagangan dan pertumbuhan ekonomi; harga energi dan pangan; inflasi dan subsidi; nilai tukar dan utang valuta asing; suku bunga serta premi risiko negara; dan peningkatan belanja pertahanan, keamanan, atau bantuan. Risiko geopolitik dengan demikian bukan hanya variabel eksternal, melainkan pemicu yang dapat secara simultan menurunkan penerimaan, meningkatkan pengeluaran, dan memperbesar biaya pembiayaan (Caldara & Iacoviello, 2022; Ahir et al., 2022).

Dampak guncangan geopolitik tidak bersifat seragam. Negara pengekspor komoditas dapat memperoleh tambahan penerimaan ketika harga meningkat, tetapi pada saat yang sama menghadapi inflasi, tekanan subsidi, dan volatilitas nilai tukar. Besarnya dampak juga bergantung pada struktur ekonomi, komposisi utang, kredibilitas kebijakan, kapasitas administratif, dan mekanisme koordinasi pusat-daerah. Oleh sebab itu, risiko geopolitik ditempatkan sebagai tekanan eksogen, sedangkan utang, kapasitas negara, dan federalisme fiskal menjelaskan saluran transmisi serta variasi responsnya.

Sintesis teoretis: Adaptive Fiscal Resilience Governance Framework

Keempat perspektif pendukung tersebut diintegrasikan di bawah Governmental Financial Resilience Theory. Rangkaian kausal dimulai dari lingkungan krisis global dan risiko geopolitik yang menghasilkan tekanan terhadap penerimaan, belanja, defisit, pembiayaan, dan pelayanan publik. Utang dan ruang

fiskal menentukan kapasitas absorptif awal, tetapi sekaligus dapat membawa kerentanan pembiayaan. Kapasitas negara menentukan kemampuan pemerintah menerjemahkan sumber daya menjadi respons yang cepat, tepat, dan legitimate. Federalisme fiskal menentukan distribusi sumber daya, kewenangan, serta risiko pada berbagai tingkat pemerintahan. Interaksi seluruh unsur tersebut menghasilkan kemampuan antisipatif, absorptif, adaptif, dan transformatif yang menentukan keberlanjutan fiskal dan nilai publik.

Kerangka tersebut menghasilkan empat proposisi teoretis. Pertama, risiko geopolitik menurunkan ketahanan fiskal melalui tekanan terhadap penerimaan, pengeluaran, dan biaya pembiayaan, tetapi pengaruhnya dipengaruhi oleh kapasitas negara. Kedua, utang publik meningkatkan ketahanan ketika digunakan secara temporer, produktif, dan dikelola berdasarkan risiko, tetapi menurunkannya ketika memperbesar risiko pembiayaan kembali dan rigiditas anggaran. Ketiga, federalisme fiskal memperkuat ketahanan apabila transfer, kewenangan, informasi, dan akuntabilitas antartingkat pemerintahan terkoordinasi secara adaptif. Keempat, ketahanan fiskal tertinggi dicapai ketika kapasitas antisipatif, absorptif, adaptif, dan transformatif bekerja secara berurutan dan menghasilkan pembelajaran kelembagaan.

Sintesis ini memperjelas posisi teoretis artikel: geopolitik merupakan sumber guncangan; utang dan ruang fiskal merupakan instrumen absorpsi sekaligus kanal kerentanan; kapasitas negara merupakan mekanisme respons dan adaptasi; sedangkan federalisme fiskal merupakan arsitektur distribusi sumber daya dan koordinasi. Hasil akhirnya bukan hanya stabilitas indikator fiskal, tetapi kesinambungan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keadilan antardaerah, kredibilitas, dan nilai publik.

C. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, menilai kualitas, dan menyintesis bukti mengenai tata kelola ketahanan fiskal adaptif. Protokol review disusun sebelum seleksi artikel dengan menetapkan pertanyaan penelitian, sumber informasi, string pencarian, batas periode, kriteria inklusi-eksklusi, prosedur penilaian kualitas, elemen ekstraksi data, dan teknik sintesis. Pelaporan proses seleksi mengikuti PRISMA 2020, sedangkan tahapan pelaksanaan mengacu pada Tranfield et al. (2003).

Pelaksanaan SLR terdiri atas tiga tahap. Tahap perencanaan meliputi perumusan pertanyaan review dan protokol. Tahap pelaksanaan meliputi pencarian, penghapusan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, pemeriksaan teks lengkap, penilaian kualitas, serta ekstraksi data. Tahap pelaporan mencakup diagram PRISMA, matriks bukti, sintesis tematik, pembahasan, dan penyusunan kerangka integratif.

Review diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan: (RQ1) bagaimana tata kelola ketahanan fiskal adaptif dikonseptualisasikan dalam literatur krisis global; (RQ2) bagaimana risiko geopolitik, utang publik, kapasitas negara, dan federalisme fiskal memengaruhi ketahanan fiskal; (RQ3) bagaimana keempat dimensi tersebut

dapat diintegrasikan; dan (RQ4) kesenjangan teoretis, metodologis, serta kebijakan apa yang perlu diteliti selanjutnya.

Untuk meningkatkan keterlacakan, setiap rekaman diberi nomor identifikasi dan dicatat pada lembar kerja seleksi. Lembar tersebut memuat sumber artikel, judul, DOI, tahun, keputusan pada tahap judul-abstrak, keputusan teks lengkap, alasan eksklusi, skor kualitas, dan status akhir. Dengan prosedur ini, setiap artikel dalam sintesis dapat dilacak kembali ke tahap identifikasi dan keputusan seleksinya.

Strategi Pencarian Literatur

Scopus digunakan sebagai basis data bibliografis utama karena menyediakan pencarian terstruktur pada judul, abstrak, dan kata kunci serta memungkinkan pembatasan tahun, jenis dokumen, dan bahasa. Pencarian dilaksanakan pada Agustus 2026. Google Scholar dan laman penerbit tidak diperlakukan sebagai basis identifikasi terpisah, tetapi digunakan untuk memeriksa metadata, DOI, sitasi yang relevan, dan ketersediaan teks lengkap. Penetapan peran tersebut mencegah penghitungan ganda antara Scopus, Google Scholar, dan laman penerbit.

Strategi pencarian menggunakan tiga blok yang saling melengkapi. Blok pertama menangkap ketahanan dan keberlanjutan fiskal; blok kedua menangkap risiko geopolitik dan risiko utang negara; sedangkan blok ketiga menangkap federalisme fiskal dan tata kelola multilevel. Seluruh string diterapkan pada TITLE-ABS-KEY dan dibatasi pada artikel jurnal berbahasa Inggris yang diterbitkan pada 2014-2026.

String 1 - ketahanan fiskal dan kapasitas negara:

TITLE-ABS-KEY(("fiscal resilience" OR "governmental financial resilience" OR "public financial resilience" OR "fiscal sustainability") AND ("government debt" OR "public debt" OR "budget deficit" OR "fiscal shock" OR "fiscal crisis" OR "fiscal governance" OR "institutional capacity" OR "state capacity")) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR < 2027 AND DOCTYPE(ar) AND LANGUAGE(english)

String 2 - risiko geopolitik dan transmisi fiskal:

TITLE-ABS-KEY(("geopolitical risk" OR "geopolitical uncertainty" OR "geopolitical shock" OR "global uncertainty") AND ("fiscal risk" OR "fiscal resilience" OR "government debt" OR "public debt" OR "sovereign debt" OR "sovereign bond" OR "budget deficit")) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR < 2027 AND DOCTYPE(ar) AND LANGUAGE(english)

String 3 - federalisme fiskal dan ketahanan multilevel:

TITLE-ABS-KEY(("fiscal federalism" OR "intergovernmental fiscal relations" OR "intergovernmental transfer*" OR "fiscal decentralization" OR "multilevel governance" OR "subnational fiscal resilience" OR "local government financial resilience") AND ("fiscal shock" OR "fiscal crisis" OR "financial resilience" OR "fiscal capacity" OR "public debt")) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR < 2027 AND DOCTYPE(ar) AND LANGUAGE(english)

Seluruh hasil ketiga string digabungkan dan diperiksa berdasarkan DOI, judul, penulis, dan tahun. Rekaman unik selanjutnya dimasukkan ke tahap penyaringan. String, batas pencarian, jumlah hasil, dan keputusan seleksi disimpan sebagai jejak audit agar proses dapat direplikasi.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi ditetapkan sebagai berikut: (1) artikel jurnal yang telah melalui peer review; (2) diterbitkan antara Januari 2014 dan Agustus 2026; (3) ditulis dalam bahasa Inggris; (4) tersedia dalam teks lengkap; (5) menggunakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sistem antarpemerintah, atau pasar utang negara sebagai konteks analisis; dan (6) membahas sekurang-kurangnya satu dimensi inti, yaitu ketahanan fiskal, keberlanjutan fiskal, utang pemerintah, manajemen krisis fiskal, kapasitas negara, federalisme fiskal, atau risiko geopolitik yang memiliki konsekuensi fiskal.

Artikel dikeluarkan apabila: (1) berada di luar periode; (2) berupa prosiding, bab buku, editorial, berita, atau laporan non-peer-reviewed; (3) berfokus pada resiliensi keuangan individu atau perusahaan tanpa hubungan dengan fiskal pemerintah; (4) membahas geopolitik tanpa variabel fiskal, utang negara, atau pembiayaan pemerintah; (5) tidak menyediakan metode dan temuan yang dapat diekstraksi; atau (6) merupakan duplikasi dari artikel yang sama.

Keputusan inklusi dilakukan berurutan pada tingkat judul-abstrak dan teks lengkap. Alasan eksklusi dicatat menggunakan kategori yang telah ditetapkan. Artikel yang memenuhi ruang lingkup tetapi memiliki kualitas terbatas tetap dapat digunakan secara terbatas dalam sintesis, sedangkan artikel dengan skor kualitas 0-3 dikeluarkan.

Proses Seleksi Studi (PRISMA)

Pencarian Scopus menghasilkan 36 rekaman unik. Google Scholar dan laman penerbit digunakan untuk pemeriksaan silang dan akses teks lengkap, sehingga tidak dihitung kembali sebagai sumber rekaman baru. Karena hasil Scopus telah dikonsolidasikan berdasarkan DOI, judul, penulis, dan tahun sebelum penyaringan, tidak terdapat rekaman duplikat dalam kumpulan akhir identifikasi.

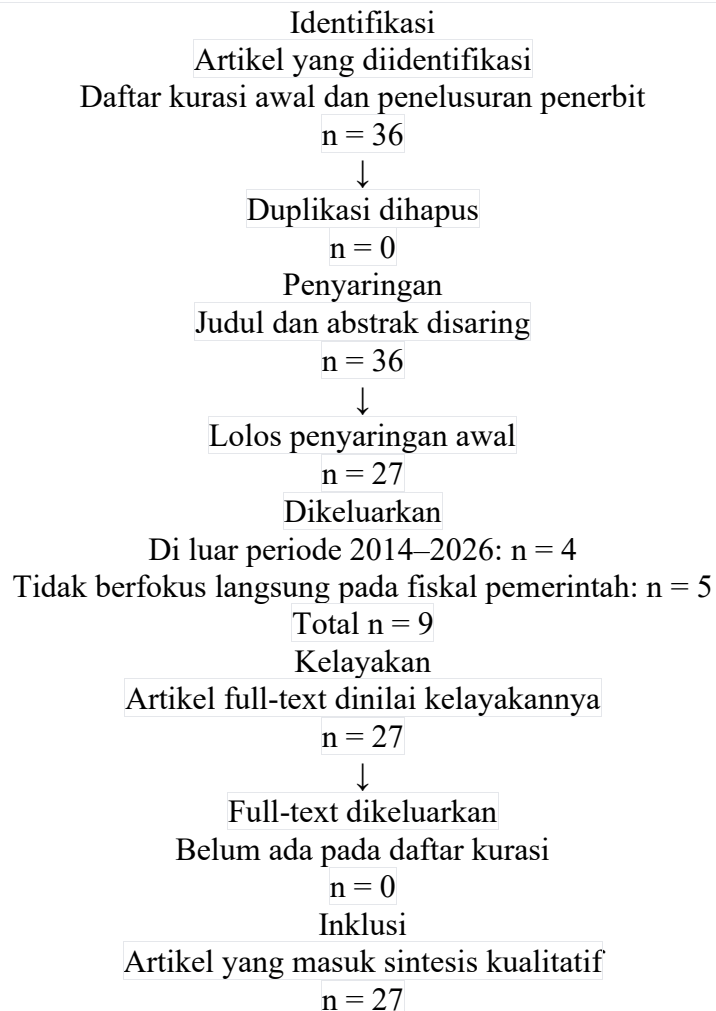
Sebanyak 36 judul dan abstrak disaring. Sembilan artikel dikeluarkan pada tahap ini: empat berada di luar periode 2014-2026 dan lima tidak berfokus langsung pada fiskal pemerintah. Dengan demikian, 27 artikel masuk pemeriksaan teks lengkap. Seluruhnya memenuhi kriteria kelayakan dan diteruskan ke penilaian kualitas serta sintesis tematik. Tidak ada artikel yang dikeluarkan pada tahap teks lengkap karena ketersediaan teks dan kesesuaian ruang lingkup telah dipastikan sebelum tahap tersebut.

Alur tersebut menghasilkan 27 artikel dalam sintesis akhir. Angka pada narasi, tabel PRISMA, ringkasan seleksi, abstrak, matriks bukti, dan kesimpulan digunakan secara konsisten.

Tabel 2. Tabel PRISMA

Tahap PRISMA	Proses seleksi	Jumlah
Identification	Rekaman yang diidentifikasi melalui Scopus	36
Cross-check	Google Scholar dan laman penerbit: verifikasi metadata/teks lengkap; tidak dihitung ulang	0
Duplicate removal	Duplikasi dihapus setelah konsolidasi DOI, judul, penulis, dan tahun	0
Screening	Judul dan abstrak yang diperiksa	36
Excluded	Di luar periode publikasi	4
Excluded	Tidak berfokus langsung pada fiskal pemerintah	5
Eligibility	Artikel teks lengkap yang dinilai	27
Included	Artikel dalam sintesis tematik	27

Alur Seleksi Literatur PRISMA



Tabel 3. Selection Flow (Summary)

Quartile	Journal	Amount
Q1	<i>Public Administration</i>	2
Q1	<i>American Economic Review</i>	2
Q1	<i>Journal of Monetary Economics</i>	1
Belum diverifikasi	<i>The Political Quarterly</i>	1
Belum tersedia	Jurnal dari 21 artikel lainnya	21
Total		27

Penilaian Kualitas Studi (SQA)

Penilaian kualitas menggunakan delapan indikator yang diadaptasi dari Joanna Briggs Institute dan disesuaikan untuk studi kuantitatif, kualitatif, konseptual, serta review. Setiap indikator diberi skor 1 apabila terpenuhi dan 0 apabila tidak terpenuhi, sehingga skor maksimum setiap artikel adalah 8.

Delapan indikator meliputi kejelasan tujuan; kejelasan konteks dan unit analisis; kecukupan kerangka teori atau konsep; keterlacakan sumber dan prosedur data; kesesuaian metode; kejelasan teknik analisis; dukungan hasil terhadap temuan; serta konsistensi kesimpulan. Kategori kualitas ditetapkan sebagai sangat baik untuk skor 8, baik untuk skor 6-7, cukup untuk skor 4-5, dan rendah untuk skor 0-3.

Berdasarkan penilaian, 18 artikel memperoleh skor 8 dan dikategorikan sangat baik, sedangkan 9 artikel memperoleh skor 7 dan dikategorikan baik. Tidak terdapat artikel pada kategori cukup atau rendah. Skor total dan kategori dicantumkan pada matriks artikel; lembar penilaian delapan indikator perlu dipertahankan sebagai jejak audit atau bahan tambahan.

Quality Assessment Matrix (JBI Evidence Table)

Tabel 4. JBI Evidence

No.	Author (Year)	JBI Score	Persentase	Kategori	Keputusan
1	Barbera et al. (2017)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
2	Steccolini et al. (2017)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
3	Coyle and Ferry (2022)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan
4	Agyemang et al. (2023)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
5	Arrieta (2022)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan
6	Barbera et al. (2024/2025)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
7	Van Helden et al. (2025)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan

No.	Author (Year)	JBIScore	Persentase	Kategori	Keputusan
8	Ahrens and Ferry (2020)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan
9	Grossi et al. (2020)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan
10	Ferry et al. (2025)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan
11	Dougherty et al. (2021)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
12	Agrawal et al. (2022)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan
13	López-Santana and Rocco (2021)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan
14	Poniatowicz (2022)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan
15	Lago and Lago-Peñas (2024)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
16	Brändle (2024)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
17	Blanchard (2019)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
18	Mauro et al. (2015)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
19	Shah et al. (2025)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
20	Caldara and Iacoviello (2022)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
21	Demiralay et al. (2024)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
22	Afonso et al. (2025)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
23	Feng et al. (2025)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
24	Papavassiliou et al. (2025)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
25	Jahan et al. (2026)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
26	Bellocchi et al. (2026)	8/8	100%	Sangat baik	Dimasukkan
27	Pike (2025)	7/8	87,5%	Baik	Dimasukkan

Ekstraksi Data dan Matriks Artikel

Tabel 5. Ekstraksi Data dan Matriks Artikel

N o.	Author (Year)	Context	Method	Key Variable s	Key Findings	Implications	SQ A (0- 8)
1	Barbera et al. (2017)	Pemerintah daerah di Austria, Inggris, dan Italia	Studi kasus komparatif	Financial shocks, anticipatory capacity, coping capacity	Respons pemerintah terhadap tekanan fiskal dipengaruhi kombinasi kapasitas organisasi dan kondisi lingkungan	Pemerintah perlu membangun kapasitas antisipatif sebelum krisis terjadi	8
2	Steccolini et al. (2017)	Ketahanan keuangan pemerintah	Pengembangan kerangka konseptual	Vulnerability, anticipatory capacity, coping capacity	Ketahanan fiskal merupakan hasil interaksi antara kerentanan dan kapasitas pemerintah menghadapi guncangan	Menjadi kerangka utama pengukuran <i>governmental financial resilience</i>	8
3	Coyle & Ferry (2022)	Tiga pemerintah lokal tingkat bawah di Inggris	Studi kasus komparatif	Austerity, financial capacity, adaptive response	Pemerintah lokal menunjukkan tingkat ketahanan yang berbeda akibat perbedaan sumber daya dan strategi adaptasi	Strategi resiliensi harus disesuaikan dengan kapasitas dan konteks lokal	7
4	Agyemang et al. (2023)	Pemerintah Ghana, Liberia, dan	Studi kasus kualitatif komparatif	Pandemic shock, financial capacity,	Pengalaman menghadapi Ebola memengaruhi	Pembelajaran dari krisis sebelumnya perlu	8

No.	Author (Year)	Context	Method	Key Variables	Key Findings	Implications	SQA (0-8)
		Sierra Leone		institutional learning	hi kesiapan fiskal pemerintah menghadapi COVID-19	dilembagakan	
5	Arrieta (2022)	Pemerintah lokal Inggris pada masa COVID-19	Analisis kelembagaan dan kebijakan	Financial capacity, risk management, collaboration	Pemerintah lokal mampu berinovasi, tetapi menghadapi keterbatasan kapasitas dan kerentanan struktural	Penguatan sumber daya dan kolaborasi diperlukan untuk menghadapi krisis besar	7
6	Barbera et al. (2025)	Manajer pemerintah lokal	Wawancara dan analisis kualitatif	Fiscal stress, perceived vulnerability, coping strategy	Persepsi manajer terhadap kerentanan memengaruhi pemilihan strategi menghadapi tekanan fiskal	Kapasitas manajerial perlu dimasukkan dalam kebijakan ketahanan fiskal	8
7	Van Helden et al. (2025)	Dukungan usaha saat COVID-19 di Belgia, Jerman, Belanda, dan Portugal	Studi komparatif kualitatif	Business support, coping response, anticipatory capacity	Struktur pemerintahan dan kapasitas administratif memengaruhi desain serta efektivitas bantuan	Desain bantuan krisis harus mempertimbangkan struktur pemerintahan dan kemampuan implementasi	8
8	Ahrens & Ferry (2020)	Pemerintah lokal Inggris	Analisis kebijakan dan	Revenue loss, expendit	Pandemi memperbesar tekanan	Pemerintah pusat perlu menjamin	7

N o.	Author (Year)	Context	Method	Key Variable s	Key Findings	Implications	SQ A (0- 8)
		setelah COVID-19	keuangan publik	ure pressure, financial resilience	terhadap pemerintah lokal yang sebelumnya menghadapi austerity	keberlanjutan pembiayaan pelayanan lokal	
9	Anessi- Pessina et al. (2020)	Penganggaran publik Italia saat pandemi	Kajian konseptual dan analisis kebijakan	Rebudgeting, reporting , participat ion, corruption risk	Krisis mengubah proses penganggaran dan pelaporan serta meningkatkan risiko lemahnya akuntabilitas	Fleksibilitas anggaran harus disertai transparansi dan pengawasan	7
10	Ferry et al. (2025)	Organisasi sektor publik dalam kondisi polycrisis	Kajian kritis integratif	Accounta bility, uncertain ty, public services, resilience	Krisis yang berulang menciptakan tantangan baru bagi akuntabilitas dan kesinambungan layanan publik	Sistem akuntabilitas harus adaptif tanpa mengurangi pengawasan	7
11	Dougherty & de Biase (2021)	Pemerintah pusat dan daerah selama COVID-19	Analisis kuantitatif dengan <i>error correction model</i>	Revenue elasticity, expenditure assignment, grants	Pemerintah pusat menyerap sebagian besar guncangan melalui belanja sosial dan transfer kepada daerah	Transfer antarpemerintahan berfungsi sebagai instrumen ketahanan fiskal	8

N o.	Author (Year)	Context	Method	Key Variable s	Key Findings	Implications	SQ A (0- 8)
12	Agrawal & Bütikofe r (2022)	Keuangan publik global saat pandemi	Kajian literatur dan sintesis kebijakan	Fiscal policy, taxation, fiscal federalis m, crisis	Pandemi memperkuat pentingnya kebijakan fiskal dan koordinasi antarpemeri ntahan	Sistem fiscal federalism perlu dirancang agar lebih responsif terhadap krisis	7
13	López-Santana & Rocco (2021)	Fiscal federalism Amerika Serikat	Analisis komparatif kelembaga an	Federal transfers, fiscal capacity, economic crisis	Respons federal pada COVID-19 berbeda dari respons terhadap Great Recession	Transfer pusat perlu cepat, memadai, dan sesuai kebutuhan daerah	7
14	Poniatowicz (2022)	Hubungan fiskal antarpemeri ntahan di Polandia	Analisis teoretis dan studi kasus	Fiscal federalis m, decentral ization, COVID-19	Pandemi meningkatk an ketergantun gan pemerintah daerah terhadap dukungan pemerintah pusat	Diperlukan keseimbanga n antara otonomi fiskal dan koordinasi nasional	7
15	Lago et al. (2024)	Transfer fiskal antarpemeri ntahan	Tinjauan literatur	Grants, tax effort, expendit ure, fiscal stability	Desain transfer memengaru hi penerimaan, belanja, insentif, dan akuntabilita s daerah	Transfer harus dirancang berdasarkan kebutuhan, kapasitas, dan insentif fiskal	8
16	Brändle & Elsener (2024)	Aturan fiskal lintas negara	Survei sistematis bukti empiris	Fiscal rules, debt, budget	Aturan fiskal berkaitan dengan	Aturan fiskal harus kredibel tetapi tetap	8

N o.	Author (Year)	Context	Method	Key Variable s	Key Findings	Implications	SQ A (0- 8)
				balance, expenditure volatility	perbaikan keseimbangan anggaran dan penurunan volatilitas belanja	fleksibel saat krisis	
17	Blanchard (2019)	Utang publik pada lingkungan suku bunga rendah	Analisis makroekonomi teoretis dan empiris	Public debt, interest rate, growth rate, welfare cost	Biaya fiskal utang dapat lebih rendah ketika suku bunga berada di bawah pertumbuhan ekonomi	Kebijakan utang harus mempertimbangkan biaya, risiko, dan kondisi makroekonomi	8
18	Mauro et al. (2015)	Perilaku fiskal pemerintah lintas negara	Analisis data historis dan fungsi reaksi fiskal	Public debt, primary balance, fiscal prudence	Respons pemerintah terhadap peningkatan utang berbeda menurut periode dan kualitas institusi	Disiplin fiskal perlu didukung institusi yang kredibel	8
19	Shah et al. (2025)	Negara-negara berkembang	Analisis keberlanjutan utang dan data panel	Public debt, primary balance, fiscal sustainability	Sebagian besar negara menunjukkan respons fiskal berkelanjutan, tetapi beberapa tetap rentan	Negara berkembang perlu membangun cadangan dan meningkatkan keseimbangan primer	8
20	Caldara and Iacoviello (2022)	Risiko geopolitik global	Analisis teks dan pengembangan indeks	Geopolitical Risk Index, investment,	Peningkatan risiko geopolitik menurunkan investasi	Indeks risiko geopolitik perlu dimasukkan dalam	8

N o.	Author (Year)	Context	Method	Key Variable s	Key Findings	Implications	SQ A (0- 8)
				economic activity	dan aktivitas ekonomi serta meningkatkan ketidakpastian	analisis risiko fiskal	
21	Demiralay et al. (2024)	Risiko kredit negara	Analisis data panel	Geopolitical risk, sovereign CDS spread, uncertainty	Risiko geopolitik meningkatkan premi CDS dan risiko kredit negara	Pemerintah perlu mengelola dampak geopolitik terhadap biaya pembiayaan	8
22	Afonso et al. (2025)	Kepemilikan utang pemerintah di 24 negara OECD	Analisis data panel dengan <i>fixed effects</i>	Geopolitical risk, sovereign debt holdings, investors	Risiko geopolitik mengubah komposisi kepemilikan surat utang pemerintah	Diversifikasi investor diperlukan untuk mengurangi kerentanan pembiayaan	8
23	Feng et al. (2025)	Risiko utang pemerintah daerah	Analisis panel dan pengujian hubungan kausal	Geopolitical shock, local government debt risk	Guncangan geopolitik memengaruhi risiko utang daerah melalui tekanan ekonomi dan keuangan	Risiko global perlu dimasukkan dalam pengelolaan utang daerah	8
24	Papavassiliou et al. (2025)	Obligasi pemerintah kawasan Euro	Analisis empiris pasar obligasi	Geopolitical risk, sovereign yields, risk premium	Peningkatan risiko geopolitik meningkatkan premi risiko	Strategi pembiayaan harus mempertimbangkan volatilitas geopolitik	8

No.	Author (Year)	Context	Method	Key Variables	Key Findings	Implications	SQA (0-8)
					obligasi pemerintah		
25	Jahan & Ryu (2026)	Negara berpendapatan rendah dan menengah bawah	Analisis data panel	Geopolitical risk, external debt, FDI, fiscal capacity	Risiko geopolitik meningkatkan ketergantungan pada utang eksternal melalui penurunan investasi	Penguatan penerimaan domestik diperlukan untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri	8
26	Bellocchi et al. (2026)	Pemerintah daerah yang menghadapi bencana banjir	Analisis data fiskal pemerintah daerah	Flood risk, public expenditure, fiscal resilience	Dampak fiskal bencana berbeda menurut kapasitas awal dan ruang fiskal pemerintah daerah	Pemerintah perlu membangun dana cadangan dan pembiayaan risiko bencana	8
27	Pike (2025)	Keuangan pemerintah lokal Inggris dalam kondisi polycrisis	Analisis kritis kebijakan dan tata kelola	Austerity, funding pressure, service demand, fiscal autonomy	Tekanan fiskal merupakan hasil kumulatif pengurangan pendanaan, peningkatan kebutuhan dan biaya layanan, serta keterbatasan otonomi pendapatan pemerintah	Diperlukan reformasi pendanaan jangka panjang, penguatan otonomi fiskal lokal, dan penataan hubungan pusat-daerah untuk menjaga layanan publik.	7

N o.	Author (Year)	Context	Method	Key Variable s	Key Findings	Implications	SQ A (0- 8)
					lokal. Perubahan inkremental tidak cukup mengatasi polycrisis.		

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan **analisis isi dan sintesis tematik**. Analisis dilakukan melalui pembacaan artikel, pemberian kode, pengelompokan kode, pembentukan tema, dan perbandingan temuan antarartikel.

Hasil analisis dikelompokkan ke dalam enam tema:

1. *Fiscal sustainability and fiscal stability*;
2. *Government debt and debt governance*;
3. *Fiscal crisis management*;
4. *Fiscal federalism and multilevel governance*;
5. *Institutional and state capacity*; dan
6. *Geopolitical fiscal risk*.

D. HASIL DAN TEMUAN

Gambaran Umum Literatur Ketahanan Fiskal

Berdasarkan sintesis terhadap 27 artikel terpilih, ketahanan fiskal berkembang dari konsep yang semula berorientasi pada stabilitas indikator menuju konsep tata kelola yang menekankan kemampuan pemerintah menghadapi guncangan. Literatur awal dalam korpus lebih banyak membahas austeritas, keberlanjutan utang, kapasitas antisipatif, dan strategi penanggulangan pemerintah daerah. Setelah pandemi COVID-19, fokus penelitian bergeser pada realokasi anggaran, dukungan fiskal, kesinambungan pelayanan publik, koordinasi antarpemerintah, dan pembelajaran kelembagaan. Sejak 2022, kajian risiko geopolitik semakin menonjol karena konflik dan ketidakpastian global terbukti memengaruhi aktivitas ekonomi, premi risiko negara, struktur kepemilikan utang, dan risiko pembiayaan pemerintah.

Konteks penelitian dalam artikel terpilih bersifat beragam. Sebagian studi menelaah pemerintah daerah di Inggris, Italia, Austria, Polandia, dan negara Eropa lainnya; sebagian membandingkan pemerintah pusat dan daerah; sedangkan studi lainnya menggunakan sampel lintas negara, negara OECD, negara berkembang, dan perekonomian berpendapatan rendah dan menengah. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa ketahanan fiskal tidak hanya relevan pada tingkat pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan unit penting karena bertanggung jawab terhadap pelayanan publik langsung, tetapi sering memiliki kewenangan penerimaan dan ruang pembiayaan yang lebih terbatas.

Dari sisi metode, korpus mencakup studi kasus komparatif, wawancara dan analisis kualitatif, analisis kebijakan, pengembangan kerangka konseptual, tinjauan literatur, analisis data panel, fungsi reaksi fiskal, serta analisis pasar utang. Studi kualitatif terutama menjelaskan proses adaptasi organisasi dan respons pemerintah lokal, sedangkan studi kuantitatif menguji hubungan utang, aturan fiskal, risiko geopolitik, premi risiko, dan kapasitas fiskal. Kombinasi tersebut memberikan dasar untuk menyintesis mekanisme kelembagaan sekaligus konsekuensi keuangan dari krisis global.

Secara keseluruhan, artikel yang ditelaah memperlihatkan bahwa ketahanan fiskal merupakan fenomena multidimensional. Posisi fiskal yang sehat penting, tetapi tidak cukup. Kemampuan menghadapi krisis juga ditentukan oleh kualitas utang, kapasitas negara, fleksibilitas kebijakan, hubungan fiskal pusat-daerah, akuntabilitas, dan kemampuan belajar dari krisis sebelumnya.

Dimensi Utama Ketahanan Fiskal Adaptif

Pertama, keberlanjutan dan stabilitas fiskal merupakan fondasi ketahanan. Literatur menekankan pentingnya basis penerimaan yang stabil, efisiensi belanja, keseimbangan primer, aturan fiskal, dan kredibilitas jangka menengah. Namun, indikator agregat tidak selalu menunjukkan kemampuan operasional pemerintah mempertahankan fungsi publik ketika krisis terjadi.

Kedua, utang pemerintah dan tata kelola utang menentukan kapasitas absorpsi sekaligus tingkat kerentanan. Struktur jatuh tempo, risiko pembiayaan kembali, komposisi mata uang, biaya bunga, basis investor, kewajiban kontinjensi, serta produktivitas penggunaan utang menentukan apakah pembiayaan memperluas atau mempersempit ruang respons pemerintah.

Ketiga, manajemen krisis fiskal mencakup realokasi anggaran, stimulus, perlindungan sosial, pengadaan darurat, dan pemulihan ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan respons tidak hanya bergantung pada ukuran stimulus, tetapi juga pada kualitas data, ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran, pengendalian internal, transparansi, dan strategi penghentian kebijakan darurat.

Keempat, kapasitas negara dan kelembagaan menjadi penghubung antara ketersediaan sumber daya dan hasil kebijakan. Kapasitas ekstraktif, administratif, koordinatif, adaptif, dan relasional memungkinkan pemerintah mendeteksi risiko, memobilisasi penerimaan, mengalihkan belanja, mengoordinasikan aktor, dan mempertahankan legitimasi selama krisis.

Kelima, federalisme fiskal dan tata kelola multilevel menentukan distribusi kewenangan, sumber daya, dan risiko. Transfer antarpemerintah dapat menjadi penyangga bagi daerah yang terdampak, tetapi ketergantungan tanpa penguatan kapasitas lokal dapat menciptakan kerentanan baru. Desain transfer perlu responsif terhadap tingkat paparan, kebutuhan pelayanan, dan kapasitas fiskal daerah.

Keenam, risiko geopolitik memperluas sumber guncangan fiskal dari faktor ekonomi domestik menuju konflik, sanksi, fragmentasi perdagangan, keamanan energi dan pangan, serta perubahan likuiditas global. Dampaknya diteruskan melalui pertumbuhan, penerimaan, subsidi, inflasi, nilai tukar, premi risiko, dan biaya pembiayaan pemerintah.

Tabel 6. Hasil dan Temuan

Dimensi tematik	Temuan utama	Implikasi tata kelola
Keberlanjutan dan stabilitas fiskal	Rasio fiskal menjaga kredibilitas, tetapi tidak cukup mengukur kemampuan respons.	Aturan fiskal adaptif, proyeksi jangka menengah, dan penyangga fiskal.
Tata kelola utang	Utang dapat menjadi penyangga atau sumber kerentanan bergantung pada kualitas portofolio dan penggunaannya.	Diversifikasi, transparansi, pengendalian risiko, dan evaluasi hasil pembiayaan.
Manajemen krisis fiskal	Respons efektif memerlukan kecepatan, ketepatan sasaran, kontrol, dan strategi keluar.	Fleksibilitas terukur, data waktu nyata, pengawasan, dan pembelajaran.
Kapasitas negara	Sumber daya hanya efektif apabila didukung kemampuan ekstraktif, administratif, koordinatif, adaptif, dan relasional.	Penguatan birokrasi, data, koordinasi, implementasi, dan legitimasi.
Federalisme fiskal	Ketahanan nasional bergantung pada kemampuan pusat dan daerah merespons secara terkoordinasi.	Transfer adaptif, pembagian tanggung jawab, dan akuntabilitas multilevel.
Risiko geopolitik	Konflik dan ketidakpastian global menekan penerimaan, belanja, dan biaya pembiayaan melalui banyak saluran.	Skenario, uji tekanan, peringatan dini, buffer, dan diversifikasi.

Struktur Hierarkis Ketahanan Fiskal Adaptif

Sintesis tematik menunjukkan bahwa ketahanan fiskal terbentuk melalui empat lapisan yang saling berhubungan. Lapisan pertama adalah lingkungan risiko global, yang mencakup konflik geopolitik, pandemi, bencana iklim, fragmentasi perdagangan, dan volatilitas keuangan. Lapisan ini merupakan sumber tekanan eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah.

Lapisan kedua adalah transmisi guncangan fiskal. Risiko global memengaruhi penerimaan, belanja, defisit, nilai tukar, biaya bunga, utang, serta kemampuan mempertahankan pelayanan publik. Besarnya tekanan dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan posisi fiskal awal masing-masing pemerintah.

Lapisan ketiga adalah kapasitas respons, yang terdiri atas ruang fiskal dan pembiayaan, kapasitas negara, serta koordinasi pusat-daerah. Lapisan ini menentukan apakah pemerintah hanya melakukan penyesuaian jangka pendek atau mampu mengembangkan respons yang adaptif dan terkoordinasi.

Lapisan keempat adalah hasil ketahanan, yaitu terjaganya keberlanjutan fiskal, kesinambungan pelayanan publik, pemulihan ekonomi, keadilan antardaerah, kredibilitas, dan nilai publik. Struktur tersebut menunjukkan bahwa ketahanan fiskal bukan hasil dari satu indikator, melainkan keluaran dari proses berlapis antara paparan, transmisi, kapasitas, dan respons.

Strategi Respons Tata Kelola Fiskal

Sintesis literatur menghasilkan lima strategi tata kelola. Pertama, pemerintah perlu membangun tata kelola risiko fiskal terpadu melalui register risiko, indikator peringatan dini, analisis skenario, dan uji tekanan yang menggabungkan pertumbuhan, suku bunga, nilai tukar, harga energi, serta kebutuhan belanja darurat.

Kedua, defisit perlu dikelola secara kontrasiklus dan berbasis kualitas belanja. Fleksibilitas pada masa krisis harus didukung kondisi pemicu yang jelas, sasaran penerima, pengawasan, batas waktu, dan jalur kembali menuju sasaran fiskal jangka menengah.

Ketiga, strategi utang perlu bergeser dari pengendalian nominal menuju tata kelola portofolio dan nilai publik. Pemerintah perlu mengelola jatuh tempo, biaya, mata uang, basis investor, serta kewajiban kontinjensi dan sekaligus memastikan bahwa pembiayaan menghasilkan kapasitas produktif atau ketahanan terhadap krisis berikutnya.

Keempat, kapasitas negara perlu diperkuat melalui administrasi penerimaan, sistem informasi fiskal, kualitas birokrasi, pengadaan, koordinasi, dan evaluasi. Penguatan ini memungkinkan kebijakan darurat dilaksanakan secara cepat tanpa menghilangkan transparansi dan akuntabilitas.

Kelima, hubungan fiskal pusat-daerah perlu dirancang sebagai sistem resiliensi multilevel. Transfer adaptif, pembagian informasi, fleksibilitas penggunaan dana, pengawasan berbasis risiko, dan penguatan kapasitas daerah diperlukan agar intensitas respons sesuai dengan kerentanan setiap wilayah.

Sintesis Temuan Utama

Secara keseluruhan, hasil SLR menunjukkan bahwa ketahanan fiskal bersifat multidimensional, berlapis, dan bergantung pada tata kelola. Keberlanjutan utang dan disiplin fiskal tetap diperlukan, tetapi keduanya tidak cukup untuk menjelaskan kemampuan pemerintah menghadapi krisis. Risiko geopolitik bertindak sebagai sumber guncangan; utang dan ruang fiskal menjadi instrumen absorpsi sekaligus kanal kerentanan; kapasitas negara menjadi mekanisme respons dan pembelajaran; sedangkan federalisme fiskal menjadi arsitektur distribusi sumber daya, kewenangan, dan risiko.

Tabel 7. Sintesis Temuan Utama

Tahap sintesis	Bukti utama	Makna
Sumber guncangan	Konflik, pandemi, iklim, fragmentasi perdagangan, dan volatilitas keuangan	Paparan eksternal dan kebutuhan skenario
Transmisi fiskal	Penerimaan, belanja, defisit, utang, biaya pembiayaan, dan layanan publik	Tingkat tekanan dan kebutuhan respons
Instrumen absorpsi	Ruang fiskal, defisit, utang, cadangan, dan transfer	Stabilisasi jangka pendek
Kapasitas adaptasi	Kapasitas ekstraktif, administratif, koordinatif, adaptif, dan relasional	Respons efektif dan pembelajaran
Arsitektur multilevel	Pembagian kewenangan, transfer, informasi, dan akuntabilitas	Koordinasi pusat-daerah
Hasil akhir	Keberlanjutan, pelayanan publik, keadilan, kredibilitas, dan nilai publik	Ketahanan fiskal adaptif

Temuan tersebut menegaskan empat hubungan utama. Pertama, guncangan geopolitik menekan ketahanan fiskal melalui penerimaan, pengeluaran, dan biaya pembiayaan. Kedua, defisit dan utang memperkuat ketahanan apabila bersifat temporer, terarah, produktif, dan dikelola berdasarkan risiko. Ketiga, kapasitas negara menentukan kemampuan mengubah sumber daya fiskal menjadi respons yang efektif. Keempat, koordinasi fiskal multilevel mengurangi ketimpangan kemampuan respons antarwilayah dan memperkuat ketahanan nasional.

Pembahasan

Ketahanan Fiskal sebagai Kapasitas Tata Kelola Dinamis

Hasil penelitian memperkuat Governmental Financial Resilience Theory yang menyatakan bahwa ketahanan pemerintah terbentuk melalui interaksi antara kerentanan, kapasitas antisipatif, dan kapasitas penanggulangan. Temuan SLR memperluas teori tersebut dengan menunjukkan bahwa kapasitas penanggulangan perlu dibedakan menjadi kemampuan absorptif, adaptif, dan transformatif. Pemerintah tidak cukup hanya mempertahankan likuiditas atau mengurangi belanja, tetapi perlu menyesuaikan instrumen dan memperbaiki kelembagaan setelah krisis.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap rasio fiskal bukan indikator tunggal ketahanan. Pemerintah dengan rasio utang yang relatif tinggi dapat tetap resilien apabila memiliki penerimaan kuat, jatuh tempo panjang, pasar domestik yang dalam, dan institusi kredibel. Sebaliknya, pemerintah dengan rasio utang moderat dapat rentan apabila menghadapi kewajiban kontinjensi, eksposur valuta asing, atau kapasitas implementasi yang lemah.

Interaksi Geopolitik, Utang, dan Kapasitas Negara

Literatur risiko geopolitik menunjukkan bahwa konflik dan ketidakpastian global tidak berhenti pada pasar keuangan. Guncangan tersebut memasuki anggaran melalui penurunan aktivitas ekonomi, perubahan penerimaan komoditas, peningkatan subsidi, pelemahan nilai tukar, kenaikan premi risiko, dan bertambahnya kebutuhan belanja. Hal ini menempatkan geopolitik sebagai variabel strategis dalam perencanaan fiskal.

Pengaruh geopolitik terhadap hasil fiskal dimediasi oleh struktur utang dan kapasitas negara. Portofolio utang yang terdiversifikasi dan administrasi yang kuat memungkinkan pemerintah merespons tanpa kehilangan kredibilitas. Sebaliknya, ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan kapasitas administratif yang rendah memperbesar transmisi guncangan. Temuan tersebut mendukung posisi state capacity sebagai mekanisme yang mengubah sumber daya menjadi hasil kebijakan, bukan sekadar karakteristik latar belakang negara.

Federalisme Fiskal dan Ketahanan Multilevel

Temuan mengenai pemerintah daerah menunjukkan bahwa ketahanan nasional merupakan hasil interaksi kapasitas pusat dan daerah. Pemerintah daerah sering menghadapi tekanan pelayanan secara langsung, tetapi memiliki basis penerimaan dan akses pembiayaan yang lebih sempit. Dukungan pusat melalui transfer dapat menstabilkan layanan, tetapi efektivitasnya bergantung pada ketepatan formula, fleksibilitas, kejelasan tanggung jawab, kualitas data, dan akuntabilitas.

Hasil ini memperluas Fiscal Federalism Theory dengan menempatkan transfer dan pembagian kewenangan bukan hanya sebagai instrumen efisiensi alokasi, tetapi sebagai infrastruktur ketahanan. Desentralisasi memperkuat resiliensi ketika memungkinkan respons kontekstual dan pembelajaran lokal. Namun, desentralisasi dapat melemahkan resiliensi apabila menghasilkan fragmentasi, ketimpangan kapasitas, mandat tanpa pendanaan, dan kegagalan koordinasi.

Kebaruan Kerangka Integratif

Kebaruan Adaptive Fiscal Resilience Governance Framework terletak pada integrasi empat rumpun yang sebelumnya terpisah. Geopolitik menjelaskan asal guncangan; utang dan ruang fiskal menjelaskan kemampuan absorpsi sekaligus kerentanan; kapasitas negara menjelaskan kualitas respons dan pembelajaran; sedangkan federalisme fiskal menjelaskan distribusi sumber daya dan koordinasi. Kerangka ini mengubah analisis dari hubungan linier menuju proses berlapis yang menghubungkan paparan, transmisi, respons, adaptasi, dan hasil publik.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah perlu membangun tata kelola risiko fiskal terpadu yang memasukkan risiko ekonomi dan non-ekonomi, pemilik risiko, indikator peringatan dini, ambang eskalasi, dan opsi mitigasi. Uji tekanan perlu menggabungkan guncangan nilai tukar, suku bunga, harga energi, pertumbuhan, dan kebutuhan belanja untuk menilai ketahanan anggaran secara lebih realistis.

Pengelolaan defisit dan utang perlu berbasis siklus, risiko portofolio, kualitas belanja, dan nilai publik. Aturan fiskal membutuhkan klausul pengecualian yang memiliki pemicu, batas waktu, pengawasan, dan jalur normalisasi. Pada saat yang

sama, hubungan fiskal pusat-daerah perlu dilengkapi transfer adaptif, pembagian data, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan kapasitas administrasi daerah.

E. KESIMPULAN

Kajian sistematis terhadap 27 artikel menunjukkan bahwa ketahanan fiskal pada era krisis global tidak dapat direduksi menjadi kemampuan menjaga defisit dan rasio utang pada batas tertentu. Ketahanan fiskal merupakan kemampuan tata kelola untuk mengantisipasi risiko, menyerap tekanan, menyesuaikan instrumen, mempertahankan pelayanan publik, dan mentransformasi institusi. Risiko geopolitik menciptakan tekanan melalui penerimaan, belanja, nilai tukar, dan biaya pembiayaan; sedangkan utang dapat menjadi penyangga atau sumber kerentanan bergantung pada kualitas tata kelolanya.

Kontribusi teoretis penelitian adalah Adaptive Fiscal Resilience Governance Framework yang mengintegrasikan Governmental Financial Resilience Theory, State Capacity Theory, Keynesian Fiscal Policy, Fiscal Federalism Theory, tata kelola utang, dan transmisi risiko geopolitik. Kerangka tersebut menempatkan kapasitas negara serta koordinasi multilevel sebagai penghubung antara guncangan global, instrumen fiskal, dan hasil berupa keberlanjutan, pelayanan publik, keadilan, kredibilitas, serta nilai publik.

Penelitian ini terbatas pada artikel berbahasa Inggris yang diidentifikasi melalui Scopus selama periode 2014-Agustus 2026. Google Scholar dan laman penerbit hanya digunakan untuk pemeriksaan silang dan akses teks lengkap, sehingga studi yang tidak terindeks Scopus mungkin tidak terwakili. Keragaman konteks dan metode membatasi perbandingan langsung antarstudi, sedangkan kerangka yang dihasilkan belum diuji secara empiris. Penelitian mendatang perlu memperluas basis data, menggunakan penilaian kualitas oleh dua penilai, menguji hubungan antarkonstruksi, dan mengembangkan indeks ketahanan fiskal yang memadukan indikator keuangan dan institusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., Alves, J., & Monteiro, S. (2025). Echoes of instability: How geopolitical risks shape government debt holdings. *Economic Change and Restructuring*, 58, Article 41. <https://doi.org/10.1007/s10644-025-09879-y>
- Agrawal, D. R., & Bütikofer, A. (2022). Public finance in the era of the COVID-19 crisis. *International Tax and Public Finance*, 29(6), 1349–1372. <https://doi.org/10.1007/s10797-022-09769-3>
- Agyemang, J., Azure, J. D.-C., Kimani, D., & Arun, T. (2023). Governmental financial resilience during pandemics: The case of West Africa. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(3), 385–414. <https://doi.org/10.1108/JPAFM-03-2021-0063>
- Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2022). The world uncertainty index (NBER Working Paper No. 29763). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w29763>
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting*

- & Financial Management, 32(5), 813–823.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098>
- Aiswarya, S., & Muthumeenakshi, M. (2024). Exploratory bibliometric analysis on geopolitical risk. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 5(4), 1180–1197.
<https://doi.org/10.47857/irjms.2024.v05i04.01652>
- Alesina, A., Favero, C., & Giavazzi, F. (2019). *Austerity: When it works and when it doesn't*. Princeton University Press.
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: Key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 957–965. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? *Public Management Review*, 23(7), 949–960.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1820272>
- Arrieta, T. (2022). An assessment of the resilience of local government in England: Was it well-equipped to overcome the COVID-19 pandemic? *The Political Quarterly*, 93(3), 408–415. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13171>
- Barbera, C., Dom, B. K., du Boys, C., Korać, S., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2025). Insights from local government managers: Navigating crises through organizational capacities and perceptions. *Public Administration Review*, 85(3), 717–736. <https://doi.org/10.1111/puar.13859>
- Barbera, C., Jones, M., Korać, S., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2017). Governmental financial resilience under austerity in Austria, England and Italy. *Public Administration*, 95(3), 670–697.
<https://doi.org/10.1111/padm.12350>
- Bellocchi, A., Lodi, C., Marin, G., Travaglini, G., & Zavalloni, M. (2026). Floods, public budgets and fiscal resilience: Evidence from Italian municipalities. *Environmental and Resource Economics*, 89, Article 56.
<https://doi.org/10.1007/s10640-026-01106-0>
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229. <https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197>
- Blanchard, O., & Leigh, D. (2013). Growth forecast errors and fiscal multipliers. *American Economic Review*, 103(3), 117–120.
<https://doi.org/10.1257/aer.103.3.117>
- Boin, A., & Lodge, M. (2021). Responding to the COVID-19 crisis: A principled approach to public governance. *Public Administration Review*, 81(5), 835–839. <https://doi.org/10.1111/puar.13366>

- Boin, A., & van Eeten, M. J. G. (2013). The resilient organization. *Public Management Review*, 15(3), 429–445. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.769856>
- Brändle, T., & Elsener, M. (2024). Do fiscal rules matter? A survey of recent evidence. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 160, Article 11. <https://doi.org/10.1186/s41937-024-00128-z>
- Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. *American Economic Review*, 112(4), 1194–1225. <https://doi.org/10.1257/aer.20191823>
- Cepiku, D., Giordano, F., Mastrodascio, M., & Wang, W. (2020). What drives resilience in public organizations? *Public Administration*, 98(4), 1059–1075. <https://doi.org/10.1111/padm.12681>
- Coyle, H., & Ferry, L. (2022). Financial resilience! A comparative study of three lower tier authorities in England. *Financial Accountability & Management*, 38(4), 686–702. <https://doi.org/10.1111/faam.12344>
- Demiralay, S., Kaawach, S., Kilincarslan, E., & Semeyutin, A. (2024). Geopolitical tensions and sovereign credit risks. *Economics Letters*, 236, Article 111609. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111609>
- Dougherty, S., & de Biase, P. (2021). Who absorbs the shock? An analysis of the fiscal impact of the COVID-19 crisis on different levels of government. *International Economics and Economic Policy*, 18, 517–540. <https://doi.org/10.1007/s10368-021-00518-1>
- Duit, A. (2016). Resilience thinking: Lessons for public administration. *Public Administration*, 94(2), 364–380. <https://doi.org/10.1111/padm.12182>
- Feng, D., Lu, Z., Tang, W., & Zhang, Y. (2025). Geopolitical shock and local government debt risk. *Finance Research Letters*, 82, Article 107572. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107572>
- Ferry, L., Hyndman, N., Liguori, M., & Midgley, H. (2025). Public accountability in an unpredictable world: Tales of the unexpected. *Abacus*, 61(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/abac.12354>
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? *American Political Science Review*, 97(2), 233–243. <https://doi.org/10.1017/S0003055403000649>
- International Monetary Fund. (2023). Fiscal monitor: On the path to policy normalization. International Monetary Fund.
- Jahan, F., & Ryu, D. (2026). Geopolitical risk and external debt burden in low-income countries. *Finance Research Letters*, 94, Article 109646. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.109646>
- Kaur, A., Kumar, V., Sindhwani, R., Singh, P. L., & Behl, A. (2024). Public debt sustainability: A bibliometric co-citation visualization analysis. *International Journal of Emerging Markets*, 19(4), 1090–1110. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2022-0724>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN Kita: Kinerja dan fakta. <https://www.kemenkeu.go.id>

- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Lago, M. E., Lago-Peñas, S., & Martinez-Vazquez, J. (2024). On the effects of intergovernmental grants: A survey. *International Tax and Public Finance*, 31, 856–908. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09816-7>
- López-Santana, M., & Rocco, P. (2021). Fiscal federalism and economic crises in the United States: Lessons from the COVID-19 pandemic and Great Recession. *Publius: The Journal of Federalism*, 51(3), 365–395. <https://doi.org/10.1093/publius/pjab015>
- Mauro, P., Romeu, R., Binder, A., & Zaman, A. (2015). A modern history of fiscal prudence and profligacy. *Journal of Monetary Economics*, 76, 55–70. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2015.09.003>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en>
- Papavassiliou, V. G. (2025). On the relationship between geopolitical risks and euro area sovereign bond yields. *Finance Research Letters*, 75, Article 106877. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106877>
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2021). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Pike, A. (2025). Fixing the ‘polycrisis’ in local government finance. *The Political Quarterly*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13562>
- Poniatowicz, M. (2022). Fiscal federalism and the COVID-19 crisis: Theoretical aspects and Poland’s experience. *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, 67(1), 517–546. <https://doi.org/10.2478/slgr-2022-0026>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Shah, S. S. A., Afridi, M. A., Luo, L., & Taşkın, D. (2025). Fiscal resilience or vulnerability? Assessing public debt sustainability in the developing countries during 1996–2020. *Journal of the Knowledge Economy*, 16(2), 8983–9017. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02251-x>
- Steccolini, I., Jones, M., & Saliterer, I. (2017). Governmental financial resilience: A framework for analysis. *Public Administration*, 95(3), 653–669. <https://doi.org/10.1111/padm.12351>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W. W. Norton.
- Tahir, M. S., & Richards, D. W. (2025). A systematic literature review of financial resilience: Antecedents, consequences and future research agenda. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 33(4), 592–615. <https://doi.org/10.1108/JFRC-10-2024-0204>

- Torring, J., Ansell, C., Sørensen, E., & Øgård, M. (2021). Public governance in turbulent times. *Public Management Review*, 23(11), 1631–1652. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1764081>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Van Helden, J., Budding, T., Gomes, P., Hesse, M., & Smolders, C. (2025). Financial resilience perspective on COVID-19 business support: A comparative study of four European countries. *Abacus*, 61(1), 121–142. <https://doi.org/10.1111/abac.12331>
- Varghese, L., & Saxena, S. P. (2025). Assessing the global research landscape on fiscal sustainability (1976–2023): A Scopus-based bibliometric analysis. *Asian Journal of Managerial Science*, 14(2), 53–65. <https://doi.org/10.70112/ajms-2025.14.2.4314>
- World Bank. (2022). Global economic prospects. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1758-8>